

Kesadaran dan Perjuangan Buruh Jawa Timur Dalam Menolak Upah Murah Di Era Pandemi

Rosselina Mulya Rahma¹, Agus Machfud Fauzi², Silkania Swarizona³

^{1,2,3}Universitas Negeri Surabaya

rosselinamulya.20054@mhs.unesa.ac.id¹, agusmfauzi@unesa.ac.id², silkaniaswarizona@unesa.ac.id³

Abstract

At the end of 2021, the East Java labor alliance flocked to carry out demonstrations at several important points, such as the Grahadi Building in Surabaya and district or city offices from each region. This demonstration was attended by workers from various regencies or cities in East Java, such as Gresik, Surabaya, Malang, Kediri, and so on. This action was carried out with the aim of demanding an increase in labor wages by 2022. Unlike the previous year, the demonstration was carried out in the midst of the Covid-19 pandemic in Indonesia. Departing from this reality, the author was prompted to analyze the existence of awareness and struggle of East Java workers in demanding wages during the Covid-19 pandemic which was analyzed using Karl Marx's theory of Awareness and Class Struggle. This research utilizes a qualitative approach with a literature study method. The source of this research comes from secondary data, namely online news, books, and journals. The results of this study show that even in the Covid-19 pandemic situation in Indonesia and in the pouring rain, all East Java labor alliances still take action to take to the streets in rejecting cheap wage increases in 2022, as predicted by Karl Marx.

Keywords: Awareness, Struggle, Labor, Demanding Salary

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, dinamika perjuangan buruh di Indonesia sudah ada sejak era pra-kolonial hingga saat ini (Dwiantoro, 2015). Di era kolonial, perjuangan perburuhan terus dilaksanakan, di mana di era tersebut sudah mulai terbentuk serikat atau organisasi untuk melawan pihak koloni, meski serikat perburuhan tersebut merupakan sebuah perkumpulan keagamaan (Sulistyo, 2018). Namun, pemberontakan masyarakat pribumi kala itu masih belum membuahkan hasil. Masyarakat pribumi selalu mengalami kekalahan dalam melawan koloni pada saat itu. Masih di era kolonial, lebih tepatnya pada abad ke-19, mulailah terbentuk struktur masyarakat kapitalis di Indonesia akibat adanya industri kapitalistik (Prayitno & Andayani, 2014).

Setelah mengalami pasang surut di awal kemerdekaan, serikat-serikat buruh mulai muncul kembali ke permukaan di era orde baru pada tahun 1950-an (Prayitno & Andayani, 2014). Perserikatan buruh mulai surut kembali pada 30 September 1965, di mana pada saat itu terjadi penculikan terhadap tokoh militer dan aktivis buruh (Sulistyo, 2018). Setelah kejadian tersebut, nilai kemanusiaan buruh tidak didengar lagi, bahkan aparat negara tak segan membungkam atau menindaklanjuti buruh yang melakukan aksi

huru-hara yang dapat merugikan negara kala itu (Sulistyo, 2018). Hingga pada tahun 1973, pemerintah pada saat itu mendirikan serikat buruh untuk masyarakat Indonesia yang dikenal dengan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) (Dwiantoro, 2015).

Meski telah dibentuk serikat pekerja oleh pemerintah, pada realitanya pemenuhan hak-hak buruh masih belum dipenuhi secara layak. Persepsi masyarakat kepada pemerintah terhadap buruh semakin cacat karena pada tanggal 8 Mei 1993 seorang aktivis buruh perempuan, yakni Marsinah dinyatakan hilang dan ditemukan di esok harinya dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa, setelah melakukan aksi demonstrasi pada peringatan hari buruh. Aksi demonstrasi ini dilakukan oleh Marsinah bersama pejuang buruh lainnya yang tidak lain karena ingin menuntut pemenuhan hak-hak buruh secara layak kepada pemilik modal maupun kepada pemerintah.

Tragedi Marsinah ternyata membekas di hati buruh Indonesia, sekaligus menyalakan api semangat untuk melanjutkan perjuangan kembali. Selain itu, peristiwa reformasi 1998 juga telah membuka peluang kepada buruh Indonesia untuk melakukan pergerakan sosial (Dwiantoro, 2015). Serikat-serikat buruh setelah reformasi pun mulai tumbuh kembali, ditambah dengan mulai adanya perhatian pemerintah kepada buruh dengan merumuskan undang-undang yang mengatur tentang perserikatan buruh. Namun, realitanya buruh tak kunjung menemui kesejahteraan, seperti upah yang masih rendah di tengah peliknya harga barang kebutuhan, fasilitas yang kurang memadai, belum lagi ketika terjadi perubahan undang-undang tentang buruh yang lebih memihak pemilik modal, dan lain sebagainya. Sehingga, tidak jarang buruh melakukan aksi demonstrasi guna menuntut hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Seperti yang terjadi di penghujung 2021, aksi demonstrasi buruh kembali terjadi untuk menuntut kenaikan gaji di tahun 2022. Aksi ini dilakukan oleh aliansi buruh Indonesia di setiap daerah Indonesia pada akhir bulan November hingga awal Desember. Hal ini juga terjadi pada aliansi buruh di Provinsi Jawa Timur, di mana para buruh di Provinsi Jawa Timur melakukan aksi demonstrasi di titik penting kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, yakni Gedung Grahadi. Selain itu, aksi ini juga dilakukan oleh para buruh di kantor kabupaten atau kota setiap daerah. Aksi ini dilakukan dengan tujuan menuntut pemerintah untuk menaikkan upah buruh di tahun 2022.

Aksi gerakan sosial buruh sebagai wujud perjuangan kaum buruh tidak luput dari kerumunan massa, di mana hal ini bertentangan dengan peraturan pemerintah di masa pandemi. Oleh karena itu, hal ini memantik penulis untuk melakukan penelitian tentang kesadaran dan perjuangan kaum buruh dalam menuntut kenaikan upah di masa pandemi yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni “Apakah kesadaran dan perjuangan buruh untuk memperjuangkan hak-haknya masih terwujud di masa pandemi?”

2. TINJAUAN PUSTAKA

Guna memperdalam referensi, penulis mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu ada kaitannya dengan penelitian ini, yakni penelitian Strategi Perjuangan Buruh Kota Surabaya Dalam Menuntut Kenaikan Upah Minimum 2013-2014 oleh Ferina Anjarsari (Anjarsari, 2014). Selanjutnya, penelitian oleh Hery Setyawan dan Mochamad Arif Affandi tentang bagaimana strategi buruh Plywood Jombang dalam memperjuangkan kenaikan upah (Setyawan & Affandi, 2017). Kemudian, penelitian oleh A. A. Ayu Murniasih mengenai usaha Kelompok Buruh Cimahi Selatan dalam memberdayakan dan memperjuangkan hak-hak kesejahteraan buruh (Murniasih, 2018). Secara keseluruhan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa terdapat kesadaran buruh yang dilanjutkan dengan perjuangan, yakni dengan aksi demonstrasi dan mogok kerja oleh buruh. Dalam melakukan aksi perjuangannya, buruh juga turut meminta bantuan dari pihak luar, seperti masyarakat, mahasiswa, LSM/LBH, serta beberapa pihak yang memiliki kekuatan penting agar perjuangan buruh dalam penuntutan upah lebih maksimal. Namun, pada kenyataannya perjuangan yang dilakukan buruh tidak selalu membawakan hasil yang diinginkan.

Lebih lanjut, penelitian ini dikaji menggunakan “Teori Kesadaran dan Perjuangan Kelas”. Fenomena tentang kesadaran dan perjuangan buruh yang menuntut hak-hak kesejahteraannya ternyata sudah diprediksi oleh tokoh sosiologi klasik, yakni Karl Marx. Menurut Karl Marx, kesadaran kaum buruh (proletar) akan mulai nampak ketika kaum buruh (proletar) secara bersamaan merasa tertindas oleh kaum pemilik modal (borjuis) di tengah-tengah industri kapitalis (Johnson, 1994). Kesadaran yang dialami oleh kaum proletar tidak semata-mata terjadi begitu saja. Kesadaran bersama ini kemungkinan dapat timbul ketika telah terjadi sebuah komunikasi antar kaum proletar yang mengalami nasib dan penderitaan yang sama karena kemerosotan ekonomi (Johnson, 1994). Berangkat dari kesadaran bersama pada kaum proletar, maka terbentuklah sebuah serikat proletar untuk melawan kaum pemilik modal (borjuis) guna menuntut hak-hak kesejahteraannya, seperti menuntut kenaikan upah, pemenuhan fasilitas kerja, dan lain-lain (Johnson, 1994). Hal inilah yang mendorong kaum proletar untuk solid dan memperjuangkan hak-haknya dalam aksi perlawanan guna mencapai perubahan sosial.

Konsep kesadaran sosial Karl Marx dimulai setelah adanya konsep kelas sosial dan materialisme historis. Menurut Marx, kesadaran kelas merupakan kesadaran personal terhadap kepentingan kelas yang objektif dan ada dalam suatu kelompok yang berasal dari kelas yang sama dalam suatu sistem produksi, di mana kepentingan yang dimaksud tersebut mengarah pada sumber materil untuk memenuhi keperluan manusia (Umanailo, 2019). Marx melihat kesadaran kelas bertumpu pada praxis manusia yang bersifat sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa bukan kesadaran yang menentukan eksistensi manusia, tetapi kehidupan sosial manusialah yang dapat menumbuhkan kesadaran sosial mereka (Giddens, 1986). Kesadaran kelas proletar (buruh) yang

didukung dengan komunikasi yang baik antar akan membentuk sebuah organisasi atau serikat-serikat se-kaum proletar untuk melawan kapitalis, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk meleburkan struktur sosial yang akan bisa menghargai kebutuhan dan nilai-nilai manusia (Johnson, 1994).

Penindasan pada kaum proletar telah menciptakan sisi antagonisme kelas yang memiliki keinginan untuk bebas dari penindasan, sehingga hal ini memungkinkan kaum proletar untuk membentuk struktur sosial masyarakat baru (Ismail & Basir, 2012). Struktur sosial atau serikat ini dikenal dengan kelas perubahan sosial atau revolusioner, yang mana di dalamnya terdapat sebuah ideologi kepentingan dari kelas tersebut untuk menyelamatkan kelas proletar dari penindasan kaum borjuis (Johnson, 1994).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, pendekatan atau metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data penelitian dengan maksud dan manfaat tertentu (Sugiyono P. D., 2013). Lebih lanjut, Sugiyono mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang beralaskan pada filsafat positivisme dan dilaksanakan secara alamiah (Sugiyono P. D., 2013). Selain itu, secara umum penelitian kualitatif seringkali dimanfaatkan untuk ilmu-ilmu sosial dan humaniora, terlebih pada kajian analisis mikro yang berhubungan dengan pola dan tingkah laku manusia (Harahap, 2020). Sejalan dengan pernyataan tersebut, tujuan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif tidak lain karena kesadaran dan perjuangan buruh dalam menuntut kenaikan upah tidak bisa dianalisis secara kuantitas atau statistik.

Jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini, yakni data sekunder yang memanfaatkan buku, jurnal, artikel, dokumen, media massa, dan lain sebagainya. Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini memanfaatkan studi kepustakaan atau literatur sebagai jenis pendekatannya. Menurut Huda (2013) studi kepustakaan atau kajian kepustakaan berusaha memecahkan permasalahan yang bertumpu pada sumber kepustakaan untuk memperoleh analisis yang lebih kritis dan mendalam (Sari & Asmendri, 2018). Dalam studi kepustakaan, kegiatan penelitian di lapangan sangat terbatas karena lebih mengandalkan sumber bacaan. Data yang terkumpul dari literatur akan dianalisis menggunakan teknik analisis data.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya, yakni melakukan teknik analisis data dan dilanjutkan dengan interpretasi data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan upaya penulis dalam mengartikan sebuah data secara keseluruhan, baik dalam bentuk teks maupun gambar (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Hal tersebut dilakukan agar penulis harus mempersiapkan data penelitian agar data bisa dikaji, dipahami, serta diinterpretasikan (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

Ada beberapa macam teknik analisis data dalam penelitian, di penelitian kali ini penulis menggunakan teknik analisis data Miles *and* Huberman. Miles dan Huberman

menyatakan dalam bukunya *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook* bahwa ada tiga tahapan yang perlu dilakukan dalam menganalisis data kualitatif, yakni mengompresi data, menampilkan data, dan menyimpulkan data (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Mengompresi data penelitian dilakukan dengan cara memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang sesuai dengan pokok permasalahan penelitian atau dengan kata lain pada proses ini data penelitian dipadatkan agar hasil penelitian lebih kuat (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Proses kompresi data akan dilakuakn secara terus menerus hingga data penelitian lengkap. Kemudian proses menampilkan atau menunjukkan data (*display data*). Proses menampilkan data sejatinya merupakan proses yang sistematis karena pada proses ini data penelitian yang telah dikompresi akan ditampilkan, sehingga dapat memudahkan proses penyimpulan data (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Hasil penampilan yang baik akan menghasilkan data analisis kualitatif yang kuat (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Bagian terakhir, yakni menyimpulkan data. Sebagai tahap analisis yang terakhir, proses ini baru bisa dilaksanakan setelah melalui dua tahap sebelumnya, yakni pengomresan data dan penyajian data. Pada proses ini penulisan kesimpulan dilakukan secara sederhana, namun bisa menjawab inti sari dari masalah penelititan dan dapat diuji kebenarannya (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Berdasarkan pernyataan Miles dan Huberman tentang teknik analisis data, dalam hal ini, langkah awal yang dilaksanakan oleh penulis, yakni mencari data berupa berita online atau media massa tentang aksi demonstrasi buruh Jawa Timur dalam menuntut kenaikan upah 2022 dan memperdalam teori kesadaran dan perjuangan kelas Karl Marx. Setelah data terkumpul, penulis akan menampilkan data penelitian yang berupa hasil kajian atau analisis teori kesadaran dan perjuangan kelas pada aksi demonstrasi buruh Jawa Timur dalam menolak kenaikan upah murah pada tahun 2022. Pada tahap akhir, penulis akan menyimpulkan hasil penelitian secara sederhana dan runtut yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Aksi Demonstrasi Buruh Jawa Timur Tolak Upah Murah

Dilansir dari laman resmi Kominfo Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Gubernur PemProv Jawa Timur, Khofifah Indra Parawansa telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 dengan besar peningkatan sebanyak 1,22%, yakni Rp 22.790,44 dari UMP tahun 2021 sebesar Rp 1.868.777,08 (KominfoJatim, 2021). Penetapan UMP ini dilaksanakan setelah melalui sidang pleno yang membahas mengenai penetapan UMP Jawa Timur pada tahun 2022 dan dihadiri oleh delapan orang perwakilan dari pemerintahan, lima orang perwakilan dari pengusaha, tujuh orang perwakilan dari serikat buruh Jawa Timur, satu orang pakar, dan satu orang dari akademisi (KominfoJatim, 2021). Perwakilan dari Gubernur, Ir. Heru Tjahjono

menyatakan bahwa penetapan UMP 2022 tidak semata-mata dibuat begitu saja, melainkan penetapan ini dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan formula penyesuaian upah minimum berdasarkan statistik BPS sebagai dasar hitungannya (KominfoJatim, 2021). Keputusan penetapan upah minimum provinsi ini secara resmi dibacakan oleh Ir. Heru Tjahjono selaku perwakilan dari Gubernur Provinsi Jawa Timur yang didampingi oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Graha Surabaya (KominfoJatim, 2021).

Merasa penetapan upah minimum tidak sesuai dengan harapan, aliansi buruh Gresik mulai melakukan aksi orasi ke beberapa titik yang diawali di Alun-Alun Gresik kemudian berakhir di Kantor Bupati Kabupaten Gresik. Tak berselang lama, perwakilan dari aliansi buruh yang melakukan aksi diundang oleh Bupati Kabupaten Gresik, Gus Yani bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dan Kapolres Kabupaten Gresik untuk berdiskusi mencari solusi yang terbaik sehingga menjadi pertimbangan dalam penetapan UMK tahun 2022 (SekilasMedia, 2021). Sebagai jalan tengahnya, Gus Yani mengatakan kepada aliansi buruh bahwa pemerintah Kabupaten Gresik bersama dengan serikat pekerja Kabupaten Gresik telah bersepakat untuk menyampaikan aspirasi atau usulan UMK 2022 kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Dewan Pengupahan Provinsi pada tanggal 30 November 2021 (SekilasMedia, 2021).

Pada akhir bulan November 2021, aliansi buruh se-Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Gedung Negara Graha Surabaya. Aksi ini dilakukan setidaknya oleh 50.000 massa buruh se-Jawa Timur, yakni Gresik, Surabaya, Kediri, Sidoarjo, Banyuwangi, Tuban, Jombang, Mojokerto, Jember, dan masih banyak lagi (Salman, 2021). Aksi ini dilakukan secara besar-besaran sebagai bentuk kekecewaan buruh Jawa Timur terhadap sikap Gubernur Jawa Timur yang tidak menemui buruh pada demonstrasi di hari-hari sebelumnya (Salman, 2021). Selain itu, salah satu juru bicara Gerakan Serikat Pekerja (Gasper), Jazuli mengatakan pada media bahwa sebelum melakukan aksi demonstrasi ini, mereka sudah diinformasikan sejak lama, baik secara tersirat maupun tersurat (Faizal, 2021). Seperti pada aksi demonstrasi sebelumnya, tuntutan buruh yang dilakukan secara besar-besaran kala itu tidak lain karena menolak upah murah kepada buruh se-Jawa Timur pada tahun 2022. Aliansi buruh yang menggelar aksi demonstrasi ini mendesak Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indra Parawansa segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 secara jujur dan besar hati karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara inkonstitusional dan bersyarat (Azmi, 2021). Selain itu, sebagai juru bicara, Jazuli meminta agar Gubernur Jawa Timur merevisi dan membahas kembali tentang penetapan upah minimum yang mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidak berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 (Azmi, 2021). Lebih lanjut, Jazuli menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk berhenti

melakukan politik upah murah untuk menarik investor, namun mengeksploitasi buruh (Azmi, 2021).

Meski di bawah guyuran hujan dan di tengah pandemi Covid-19, aksi demonstrasi ini tetap dilaksanakan oleh aliansi buruh se-Jawa Timur (Ramadani, 2022). Aliansi buruh mengatakan bahwa mereka kecewa terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur dalam melakukan penetapan upah minimum provinsi karena selama ini aliansi butuh telah mengusulkan kenaikan upah sebesar Rp 300.000,00 (Baihaqi, 2021). Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur, Ahmad Fauzi mengatakan bahwa aliansi buruh tidak sembarangan dalam menginginkan kenaikan upah sebanyak Rp 300.000,00 (Baihaqi, 2021). Menurutnya, kenaikan upah dalam nominal tersebut masih realistis. Selain itu, upah buruh di Provinsi Jawa Timur juga merupakan salah satu upah terendah di antara upah buruh lainnya di provinsi Indonesia (Baihaqi, 2021).



Gambar 4.1: Aksi Demonstrasi Dalam Menolak Upah Murah 2022

Analisis Data Terhadap Teori Kesadaran dan Perjuangan Kelas Karl Marx

Menurut Karl Marx, kesadaran kaum proletar tidak terjadi begitu saja, kesadaran kaum proletar mulai muncul ketika mereka merasa tertindas oleh kaum borjuis di tengah industri kapitalis (Johnson, 1994). Sejalan dengan itu, buruh Jawa Timur melakukan aksi demonstrasi juga disertai dengan sebab. Mereka melakukan aksi demonstrasi ke Gedung Negara Graha, Surabaya setelah Gubernur Jawa Timur melalui perwakilannya, Ir. Heru Tjahjono menetapkan ketentuan upah minimum provinsi 2022 yang dirasa kurang menguntungkan buruh, di mana penetapan kenaikan upah minimum hanya naik 1,22% dari tahun 2021. Artinya, kenaikan upah minimum pada 2022 naik sebesar Rp 22.790,44. Aksi demonstrasi yang diikuti oleh 50.000 massa buruh se-Jawa Timur juga sebagai wujud kekecewaan buruh karena Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indra Parawansa tidak menemui buruh yang telah melakukan aksi demonstrasi pada sebelumnya. Selain itu, salah satu perwakilan buruh mengatakan bahwa rencana aksi

demonstrasi buruh sudah tersebar luas di media massa sebelum mereka melakukan aksi. Hal ini juga telah dikatakan oleh Karl Marx bahwa kesadaran kaum proletar terjadi karena adanya komunikasi, serta memiliki rasa senasib dan sepenanggungan (Johnson, 1994). Aksi solid ini dilakukan oleh buruh karena mereka ingin menuntut hak-hak mereka agar dipenuhi secara layak.

Aksi demonstrasi buruh se-Jawa Timur ini berasal dari kesadaran personal tiap buruh, di mana setiap buruh ternyata memiliki kesadaran yang sama terkait penetapan kenaikan upah, sehingga melalui proses komunikasi mereka membuat serikat untuk melakukan aksi demonstrasi penolakan upah murah. Selain itu, mereka melakukan aksi demonstrasi penolakan upah murah juga berkaca pada harga kebutuhan hidup yang semakin melonjak. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Karl Marx, kesadaran kelas proletar sebenarnya berawal dari kesadaran personal para kaum proletar untuk menuntut kebutuhan materil (Umanailo, 2019). Setelah kaum buruh Jawa Timur memiliki kesadaran dan memiliki rasa senasib dan sepenanggungan, terjadilah komunikasi di antara mereka untuk membuat kelompok guna melakukan aksi demonstrasi penolakan upah murah dengan harapan hak-hak buruh Jawa Timur dapat dipenuhi atau direalisasikan oleh Gubernur Jawa Timur. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Marx, di mana komunikasi yang baik antar kaum proletar akan membentuk sebuah organisasi proletar guna melawan kapitalis, sehingga kaum proletar memiliki kekuatan untuk meleburkan struktur sosial dan kaum borjuis bisa menghargai kebutuhan nilai-nilai kemanusiaan (Johnson, 1994).

Karl Marx mengatakan bahwa kaum proletar yang mengalami penindasan akan menjadi proletar antagonis dan mereka memiliki keinginan bebas dari penindasan, sehingga timbulah kelas sosial baru, yakni kelas revolusioner (Ismail & Basir, 2012). Buruh se-Jawa Timur yang turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi menolak penetapan kenaikan upah secara tidak langsung telah membentuk kelas sosial baru, yakni kelas revolusioner, di mana mereka ingin menuntut hak mereka sebagai buruh untuk mendapatkan kenaikan upah 2022 secara manusiawi. Lebih lanjut, Marx mengatakan bahwa kelas revolusioner atau perubahan sosial memiliki ideologi untuk kepentingan mereka bersama, seperti keinginan untuk bebas dari tekanan kaum borjuis (Johnson, 1994). Buruh se-Jawa Timur yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya tidak lain membawa harapan pada pemenuhan upah 2022 secara layak, yang sekaligus menjadi ideologi mereka dalam melakukan aksi demonstrasi dan orasi. Buruh se-Jawa Timur bahkan rela melakukan aksi demonstrasi dan orasi, meski di tengah-tengah situasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang belum selesai. Selain itu, mereka pun rela diguyur hujan demi mendapatkan menyuarkan hak-hak mereka, yakni hak mendapatkan upah secara layak dan manusiawi.

Kesadaran dan perjuangan kelas kaum tertindas (proletar), tentu tidak selamanya berhasil menciptakan revolusi secara menyeluruh, namun setidaknya kaum tertindas (proletar) berusaha menciptakan sebuah revolusi sosial yang akan menguntungkan

kaumnya (Johnson, 1994). Sehubungan dengan pernyataan tersebut, aliansi buruh se-Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya demi kesejahteraan buruh dengan cara demo di Gedung Graha di Surabaya, walau diterpa hujan. Meski dengan adanya demo aliansi buruh se-Jawa Timur tidak bisa mengubah keputusan kenaikan upah buruh Jawa Timur yang menyiksa buruh, namun setidaknya aliansi buruh se-Jawa Timur sudah memiliki kesadaran dan melakukan perjuangan untuk mendapatkan haknya, sesuai pernyataan Karl Marx tersebut.

5. PENUTUP

Pada akhir November 2021, aliansi buruh se-Jawa Timur melakukan aksi demonstrasi di Gedung Negara Graha di Surabaya, setelah Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui perwakilannya, Ir. Heru Tjahjono secara resmi mengumumkan penetapan kenaikan upah 2022 sebanyak 1,22% atau Rp 22.790,44 dari tahun sebelumnya. Menurut buruh, kenaikan upah tersebut tidak sesuai dengan harapan buruh, di mana mereka meminta kenaikan upah sebesar Rp 275.000-Rp 300.000. Aksi demonstrasi ini diikuti oleh buruh se-Jawa Timur sebanyak 50.000 massa. Sesuai dengan pernyataan Karl Marx bahwa kaum proletar yang merasa tertindas oleh kaum borjuis di tengah industri kapitalis akan melakukan sebuah pemberontakan untuk menuntut kebebasan dan keadilan. Kaum proletar yang memiliki rasa senasib dan sepenanggungan dengan kaum proletar yang lain akan membentuk serikat baru, yakni kaum revolusioner dengan tujuan perubahan sosial. Berdasarkan pernyataan Marx tersebut, secara tidak langsung aksi buruh se-Jawa Timur telah membentuk serikat baru, yakni kelas revolusioner dengan tujuan untuk menolak upah murah yang telah diumumkan oleh perwakilan Gubernur Jawa Timur. Berdasarkan data yang telah diperoleh, buruh yang memiliki ideologi, serta memiliki rasa senasib and seperjuangan tetap melakukan aksi demonstrasi, meski diguyur hujan dan di situasi pandemi yang masih merangkul Indonesia. Aksi demonstrasi buruh se-Jawa Timur yang dilaksanakan di Gedung Graha di Surabaya dengan membawa harapan untuk menolak upah 2022 yang murah sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Timur telah membuktikan bahwa kesadaran dan perjuangan buruh sebagai kaum proletar dalam memperjuangkan hak-haknya masih tetap dilaksanakan, meski di tengah situasi pandemi Covid-19.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Anjarsari, F. (2014). Strategi Perjuangan Buruh Kota Surabaya dalam Menuntut Kenaikan Upah Minimum 2013-2014. *Jurnal Politik Muda*, 3(1), 32–41. <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/jpm50fdca6783full.pdf>
- Azmi. (2021). *Buruh Kembali Gelar Demo Soal Susun Ulang-Revisi UMK di Gedung Graha*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5845935/buruh-kembali-gelar-demo-soal-susun-ulang-revisi-umk-di-gedung-grahadi>

- Baihaqi, A. (2021). *UMP Jatim Cuma Naik Rp 22.790, Buruh Ancam Demo Besar-besaran*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5821225/ump-jatim-cuma-naik-rp-22790-buruh-ancam-demo-besar-besaran>
- Dwiantoro, A. (2015). *Strategi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Dalam Menuntut Kenaikan Upah Minimum Kota Surabaya Tahun 2014-2015* [Universitas Airlangga]. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/16653>
- Faizal, A. (2021). *Pemprov Jatim Buat Kesepakatan dengan Buruh soal Upah Minimum, Ini Isinya*. RegionalKompas. <https://regional.kompas.com/read/2021/11/30/202454378/pemprov-jatim-buat-kesepakatan-dengan-buruh-soal-upah-minimum-ini-isinya>
- Giddens, A. (1986). *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu analisis karya-tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*. UI Press.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali (ed.); 1st ed.). Wal ashri Publishing.
- Ismail, I., & Kamal Basir, M. Z. (2012). Karl Marx dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial. *International Journal of Islamic Thought*, 1(1), 27–33. <https://doi.org/10.24035/ijit.01.2012.004>
- Johnson, D. P. (1994). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (1st ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- KominfoJatim. (2021). *UMP Jatim Tahun 2022 Resmi Ditetapkan*. KominfoJatim. <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/ump-jatim-tahun-2022-resmi-ditetapkan->
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Miles, & Huberman. (1999). *Qualitative Data Analysis An Expanded Sourcebook 2nd Edition by Matthew B. Miles, Michael Huberman* (p. 354). SAGE Production.
- Murniasih, A. A. A. (2018). *Upaya Kelompok Buruh Cimahi Selatan dalam Memperjuangkan Hak-Hak Kesejahteraan Sosialkaum Buruh*. 46–57. <https://doi.org/10.24843/SP.2018.v2.i01.p04>
- Prayitno, A., & Andayani, A. (2014). Perkembangan Organisasi Buruh Di Surabaya Tahun 1950-1959. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 2(3).
- Ramadani, F. (2022). *Di Bawah Guyuran Hujan, Ratusan Buruh Gelar Unjuk Rasa di Surabaya Menuntut Revisi UMK Jatim 2022*. Surya. <https://surabaya.tribunnews.com/2022/02/07/di-bawah-guyuran-hujan-ratusan-buruh-gelar-unjuk-rasa-di-surabaya-menuntut-revisi-umk-jatim-2022>

- Salman, G. (2021). *50.000 Buruh Se-Jatim Tiba di Gedung Negara Grahadi, Massa Aksi: Hentikan Politik Upah Murah*. RegionalKompas. <https://regional.kompas.com/read/2021/11/30/152522678/50000-buruh-se-jatim-tiba-di-gedung-negara-grahadi-massa-aksi-hentikan?page=all>
- Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2(1), 15. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- Sekilas Media. (2021). *Temui Demo Buruh, Bupati Yani Sepakat Sampaikan Permintaan Buruh Ke Gubernur Jatim*. SekilasMedia.Com. <https://sekilasmedia.com/2021/11/26/temui-demo-buruh-bupati-yani-sepakat-sampaikan-permintaan-buruh-ke-gubernur-jatim/>
- Setyawan, H., & Affandi, M. A. (2017). Strategi Perjuangan Serikat Buruh Dalam Tuntutan Kenaikan Upah Di Kabupaten Jombang. *Paradigma*, 5(3), 1–11.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. ALPHABET CV.
- Sulistyo, B. (2018). Pasang Surut Gerakan Buruh Indonesia. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 13(2), 10. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jlb/article/view/5314>
- Umanailo, M. C. B. (1986). *Pemikiran-Pemikiran Karl Marx*.